



STRATEGI NEGOSIASI PERDAGANGAN AS TERHADAP CHINA DALAM KASUS HUAWEI: ANALISIS KOMUNIKASI POLITIK DONALD TRUMP MELALUI X

Bambang Dwisatriyo, Muhammad Haikal Hazami, Nabila Khoerunnisa,

Ragil Sadirah Faiziyyah, Rifqy Dhiya Ulhaq, Pia Khoirotun Nisa

Program Studi Komunikasi Dan Penyiaran Islam Fakultas Dakwah Dan Ilmu Komunikasi

UIN Syarif Hidayatullah Jakarta

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis strategi negosiasi perdagangan Amerika Serikat terhadap Tiongkok dalam kasus Huawei pada masa kepemimpinan Presiden Donald Trump. Fokus penelitian diarahkan pada penggunaan media sosial X (dulu Twitter) sebagai alat komunikasi politik dalam membentuk narasi diplomatik. Pendekatan kualitatif dengan paradigma konstruktivis dan metode studi kasus digunakan untuk menggambarkan dinamika komunikasi dan dampaknya terhadap hubungan bilateral. Hasil penelitian menunjukkan bahwa komunikasi politik digital memiliki peran sentral dalam membentuk opini publik dan tekanan diplomatik global.

Kata Kunci: Huawei, negosiasi, komunikasi politik.

PENDAHULUAN

Sejak tahun 2018, perang dagang antara Amerika Serikat dan China menciptakan suatu ketegangan ekonomi global². Kebijakan tarif yang tinggi oleh Amerika Serikat terhadap China dibalas serupa oleh Tiongkok. Dampak dari

konflik dagang ini tidak hanya pada dua negara ini, tetapi juga menimbulkan efek domino terhadap negara-negara lainnya, termasuk Indonesia.

Disamping itu perang dagang yang terjadi antara Amerika Serikat dan China kembali memanas pada tahun

*Correspondence Address : bambankdwisatriyo@gmail.com

DOI : 10.31604/jips.v12i8.2025. 3377-3381

© 2025UM-Tapsel Press

² Kementerian Pertahanan Republik Indonesia. (2025, April 16). *Perang dagang AS-Tiongkok: Dampak, peluang, tantangan dan solusi strategis bagi Indonesia*. Diakses dari www.kemhan.go.id

2025, pemicunya adalah kebijakan tarif tinggi dari Pemerintahan Presiden Donald Trump. Penambahan tarif impor menjadi 145% telah menciptakan ketegangan global. Indonesia sebagai mitra dagang utama kedua negara menghadapi dampak signifikan, namun juga memiliki peluang yang strategis untuk dimanfaatkan.

Huawei menjadi upaya China untuk mencapai swasembada dalam teknologi, terutama dalam menghadapi Amerika Serikat. Amerika Serikat khawatir teknologi Huawei dapat digunakan oleh pemerintahan China untuk melakukan tindakan spionase. Meskipun Amerika Serikat tidak memiliki bukti kuat, kekhawatiran ini tetap ada.

Di sisi lain, pemerintah China mengancam langkah tersebut sebagai bentuk proteksionisme teknologi dan upaya AS untuk mempertahankan dominasinya di sektor teknologi global. Bagi China, Huawei adalah lambang keberhasilan pembangunan industri teknologi dalam negeri, serta cerminan kebangkitan nasional dalam menghadapi hegemoni Barat.

Ketegangan yang berakar pada isu teknologi ini kemudian meluas ke ranah diplomatik, perdagangan, hingga keamanan global, menjadikan Huawei sebagai representasi nyata dari konflik struktural antara dua kekuatan dunia yang tengah bersaing membentuk tatanan global baru. Dengan demikian, memahami posisi Huawei dalam konteks geopolitik global penting untuk menelaah dinamika baru dalam perang dingin modern antara Amerika Serikat dan China.

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah mengubah lanskap komunikasi politik secara fundamental. Di era digital, komunikasi politik tidak lagi terbatas

pada media konvensional, melainkan telah merambah ke berbagai platform digital seperti media sosial, situs web resmi, dan kanal *streaming* yang menjadi medium utama dalam penyampaian pesan politik kepada publik global.³

Perang dagang yang dimulai sejak tahun 2018 bukan hanya melibatkan kebijakan tarif dan regulasi ekonomi, tetapi juga menjadi ajang pertarungan narasi antara kedua negara. Amerika Serikat dan China saling membentuk opini publik global melalui pernyataan digital, kampanye daring, dan publikasi di media sosial untuk membenarkan kebijakan masing-masing, membangun citra positif, serta menekan lawan melalui pengaruh opini publik internasional.

Pentingnya komunikasi politik digital dalam perang dagang terletak pada kemampuannya membentuk persepsi, memobilisasi dukungan, dan mengontrol narasi yang berkembang di ruang publik. Negara yang mampu mengelola komunikasi digital dengan efektif memiliki keuntungan dalam mempengaruhi diskursus internasional dan memperkuat posisinya di tengah persaingan global. Dengan demikian, komunikasi politik digital bukan sekadar alat pelengkap, melainkan senjata utama dalam perang dagang yang melibatkan strategi, propaganda, dan diplomasi publik.

METODE

Penelitian ini menggunakan paradigma konstruktivis dan pendekatan kualitatif deskriptif. Metode studi kasus dipilih dengan fokus pada analisis konten cuitan Donald Trump tentang Huawei, serta wawancara dengan akademisi di bidang komunikasi politik. Teknik pengumpulan data meliputi dokumentasi digital dan wawancara mendalam. Data dianalisis

³ Kementerian Pertahanan Republik Indonesia. (2025, April 16). *Perang dagang AS-Tiongkok*:

Dampak, peluang, tantangan dan solusi strategis bagi Indonesia. Diakses dari www.kemhan.go.id

menggunakan pendekatan analisis konten kualitatif berdasarkan teori komunikasi politik Dan Nimmo.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Strategi Negosiasi Perdagangan AS terhadap China dalam Kasus Huawei

Pemerintah Donald Trump menerapkan strategi negosiasi perdagangan yang bersifat konfrontatif terhadap China, dengan menjadikan Huawei sebagai alat utama tekanan ekonomi dan simbol proteksi kepentingan nasional AS. Strategi ini mencerminkan praktik *coercive diplomacy*, yakni menekan lawan dengan sanksi ekonomi tanpa menggunakan kekuatan militer.⁴ Trump juga menggunakan Huawei sebagai alat tawar dalam negosiasi dagang.

Dalam pernyataannya pada Mei 2019, ia menyebut bahwa Huawei "sangat berbahaya", namun menambahkan bahwa perusahaan ini bisa menjadi bagian dari "kesepakatan dagang". Pendekatan ini memperlihatkan ambiguitas strategis dalam negosiasi. Strategi ini selaras dengan pendekatan negosiasi berbasis kepentingan nasional di mana kekuatan teknologi menjadi daya tawar politik dan ekonomi.

Komunikasi Politik Donald Trump melalui X (Twitter) dalam Strategi Negosiasi

Teori Komunikasi Politik menurut Dan Nimmo menjelaskan bahwa komunikasi politik mencakup: (1) pelaku politik, (2) pesan politik, (3) media, dan (4) audiens. Keempat elemen

ini hadir secara aktif dalam cara Trump membingkai Huawei melalui X (Twitter):

1) Pelaku politik: Trump sebagai aktor utama.

2) Pesan politik: Framing Huawei sebagai "ancaman keamanan nasional".

3) Media: Twitter/X sebagai saluran langsung ke publik global.

4) Audiens: Publik AS dan internasional, termasuk pemimpin negara sekutu. Trump menyebut Huawei sebagai "alat mata-mata China", dan melalui tweet-nya pada 23 Mei 2019 menyatakan:

"Huawei is very dangerous. China wants to use it to spy on America. We won't let that happen." (Sumber: Arsip Twitter via Internet Archive)

Simbolisasi seperti "*danger*", "*spy*", dan "*keep America safe*" adalah bentuk *framing* menurut Nimmo, yang dimaksudkan untuk menanamkan makna ancaman pada publik. Komunikasi ini bersifat populis dan langsung, mencerminkan gaya khas Trump dalam membentuk persepsi publik untuk memperkuat legitimasi kebijakan luar negerinya.⁵

Dampak Komunikasi Politik terhadap Persepsi Publik dan Dinamika Hubungan Dagang AS-China

Komunikasi politik yang dibangun Donald Trump melalui media sosial X berdampak signifikan terhadap persepsi publik dan dinamika hubungan dagang antara Amerika Serikat dan China. Melalui framing bahwa Huawei merupakan ancaman keamanan nasional, Trump berhasil membentuk opini publik domestik dan internasional bahwa kebijakan pelarangan terhadap Huawei merupakan langkah

⁴ Widyaningrum, A. P., Putranti, I. R., & Hanura, M. (2022). *Integrasi Faktor Struktur dan Domestik dalam Kebijakan Jaringan Bersih 5G Amerika Serikat pada Masa Pemerintahan Donald Trump*. Journal of International Relations Diponegoro, 8(4).

⁵ Yovana, K., & Putri, A. R. (2022). Strategi Kampanye Donald Trump. *Moestopo Journal of International Relations*, 4(2), 123–135.

perlindungan nasional, bukan sekadar proteksionisme.

Cuitan seperti "*Huawei is very dangerous. China wants to use it to spy on America.*" bukan hanya bentuk tuduhan, melainkan alat membangun legitimasi kebijakan luar negeri AS. Dalam teori komunikasi politik Dan Nimmo, penggunaan simbol seperti "*spy company*" adalah bagian dari strategi pembentukan makna dalam politik, membentuk realitas sosial dan politik melalui bahasa dan emosi (Nimmo, 2001).

Dampak dari strategi komunikasi ini terlihat jelas pada kebijakan beberapa negara sekutu AS, seperti Inggris, Australia, dan Jepang, yang kemudian membatasi atau melarang penggunaan teknologi Huawei.⁶⁷ BBC mencatat bahwa Inggris resmi memutuskan untuk menghapus Huawei dari infrastruktur jaringan 5G nasional pada Juli 2020 setelah tekanan dari AS.⁸ Sebuah studi dalam *Journal of Chinese Political Science* (2023) juga menunjukkan bahwa negara-negara yang bergantung pada jaminan keamanan AS cenderung mengikuti sikap Washington, sedangkan negara dengan kepentingan ekonomi kuat ke China memilih tetap menerima Huawei.⁹

Berdasarkan wawancara dengan narasumber,¹⁰ strategi komunikasi Trump juga memainkan peran dalam membangun tekanan diplomatik terhadap China. Narasumber

menekankan bahwa emosi, terutama ketakutan terhadap potensi spionase, dimanfaatkan sebagai alat mobilisasi opini publik. Hal ini menguatkan pandangan Nimmo bahwa emosi publik dalam komunikasi politik sering menjadi sarana untuk menggerakkan tindakan politik dan memperkuat dukungan terhadap kebijakan tertentu.¹¹

Sebaliknya, China menanggapi tekanan ini dengan pendekatan diplomasi simbolik. Presiden Xi Jinping menggunakan metafora "filosofi laut dan badai" untuk menggambarkan ketahanan nasional, menggambarkan China sebagai kapal besar yang siap menghadapi guncangan global. Menurut wawancara,¹² hal ini mencerminkan strategi kontra-narasi diplomatik yang mengedepankan ketenangan, stabilitas, dan perdamaian global, berbeda dengan pendekatan agresif yang digunakan oleh AS.

Melalui kasus ini, dapat dilihat bahwa media digital tidak lagi sekadar alat komunikasi politik, melainkan telah menjadi arena diplomasi dan negosiasi global. Komunikasi politik dalam bentuk digital berfungsi untuk membentuk opini, memperkuat legitimasi kebijakan luar negeri, dan memengaruhi sikap negara lain terhadap konflik internasional.

Dengan demikian, strategi komunikasi politik digital Donald Trump terbukti menjadi instrumen penting dalam negosiasi dagang AS-China, di

⁶ Arinanda, B. P., Windiani, R., & Paramasatya, S. (2022). Perang Teknologi Amerika Serikat vs Tiongkok: Kebijakan Penolakan Teknologi 5G Huawei Tiongkok oleh Amerika Serikat. *Journal of International Relations*,

⁷ (2), 72–81. Universitas Diponegoro. Diakses melalui <http://ejournal-s1.undip.ac.id/index.php/jihi>

⁸ BBC News. (2019). *Huawei: US to ban firms from using foreign telecoms gear*. Diakses dari <https://www.bbc.com/news>

⁹ Journal of Chinese Political Science. (2023). *The US Way or Huawei? An Analysis of the Positioning of Secondary States in the US-China Rivalry*, 29,

77–108. Diakses melalui [The US Way or Huawei? An Analysis of the Positioning of Secondary States in the US-China Rivalry | Journal of Chinese Political Science](#)

¹⁰ Wawancara Pribadi dengan Dirga Maulana, Selasa 29 April 2025 pukul 08.00 WIB

¹¹ Roissyam, A. Y., & Nugroho, B. W. (2023). *Restrictive Policies on Huawei During the Donald Trump Administration: An Analysis of U.S. National Security and Geopolitical Interests*. Universitas Muhammadiyah Yogyakarta Undergraduate Conference, 3(1).

¹² Wawancara Pribadi dengan Dirga Maulana, Selasa 29 April 2025 pukul 08.00 WIB

mana pembentukan opini publik global dan tekanan kepada negara sekutu turut menentukan arah kebijakan internasional terhadap Huawei.

KESIMPULAN

Strategi negosiasi Trump terhadap Huawei menggabungkan tekanan ekonomi dan komunikasi politik digital. Penggunaan media sosial X sebagai alat diplomasi publik memungkinkan penyebaran narasi yang efektif dalam membentuk persepsi global. Dalam konteks politik global modern, media sosial telah menjadi bidang diplomasi baru yang berpengaruh dalam negosiasi internasional.

REFERENSI

Widyaningrum, A. P., Putranti, I. R., & Hanura, M. (2022). *Integrasi Faktor Struktur dan Domestik dalam Kebijakan Jaringan Bersih 5G Amerika Serikat pada Masa Pemerintahan Donald Trump*. *Journal of International Relations Diponegoro*, 8(4).

Yovana, K., & Putri, A. R. (2022). Strategi Kampanye Donald Trump. *Moestopo Journal of International Relations*, 4(2), 123–135.

Arinanda, B. P., Windiani, R., & Paramasatya, S. (2022). Perang Teknologi Amerika Serikat vs Tiongkok: Kebijakan Penolakan Teknologi 5G Huawei Tiongkok oleh Amerika Serikat. *Journal of International Relations*, (2), 72–81. Universitas Diponegoro. Diakses melalui <http://ejournal-s1.undip.ac.id/index.php/jihi>

BBC News. (2019). *Huawei: US to ban firms from using foreign telecoms gear*. Diakses dari <https://www.bbc.com/news>

Journal of Chinese Political Science. (2023). *The US Way or Huawei? An Analysis of the Positioning of Secondary States in the US-China Rivalry*, 29, 77–108. Diakses melalui [The US Way or Huawei? An Analysis of the Positioning of Secondary States in the US-China Rivalry | Journal of Chinese Political Science](#)

Roissyam, A. Y., & Nugroho, B. W. (2023). *Restrictive Policies on Huawei During the*

Donald Trump Administration: An Analysis of U.S. National Security and Geopolitical Interests. Universitas Muhammadiyah Yogyakarta Undergraduate Conference, 3(1).

Kementerian Pertahanan Republik Indonesia. (2025, April 16). *Perang dagang AS-Tiongkok: Dampak, peluang, tantangan dan solusi strategis bagi Indonesia*. Diakses dari www.kemhan.go.id

Kementerian Pertahanan Republik Indonesia. (2025, April 16). *Perang dagang AS-Tiongkok: Dampak, peluang, tantangan dan solusi strategis bagi Indonesia*. Diakses dari www.kemhan.go.id